

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan publik merupakan elemen krusial dalam administrasi pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya negara untuk mencapai sasaran pembangunan. Keuangan publik tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai alat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara sistematis, patuh pada hukum yang berlaku, serta efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung program dan kegiatan pemerintah. Dalam pelaksanaannya, salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan anggaran adalah tingkat penyerapan anggaran, yaitu perbandingan antara realisasi dan pagu anggaran yang telah ditetapkan. Tingkat penggunaan anggaran menunjukkan seberapa jauh program yang direncanakan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu anggaran yang sedang berlangsung. Efektivitas penyerapan anggaran tidak hanya dinilai dari tinggi rendahnya persentase realisasi, tetapi juga dari kemampuan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program tepat waktu dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat (Rizki et al., 2023).

Tingkat penyerapan anggaran sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dengan perencanaan anggaran sebagai salah satu yang paling mendasar. Proses perencanaan anggaran adalah upaya untuk menetapkan langkah-langkah ke depan melalui berbagai pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada, sehingga menjadi tahapan yang krusial sebelum aktivitas dimulai. Perencanaan yang tidak akurat dapat menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan anggaran dan memengaruhi rendahnya tingkat realisasinya. Tidak hanya perencanaan, realisasi anggaran juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah serta koordinasi antara semua pihak yang terlibat. Revisi anggaran yang dilakukan serta modifikasi terhadap rencana awal membuat pelaksanaan anggaran menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu tambahan (Kuntadi & Rosdiana, 2022).

Masalah lain yang sering muncul adalah ketidakmerataan dalam penyerapan anggaran sepanjang tahun. Fenomena yang umum dijumpai adalah rendahnya realisasi anggaran di awal tahun yang kemudian meningkat drastis menjelang akhir tahun anggaran. Situasi ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan di awal tahun berjalan lambat, sementara di akhir tahun terjadi penumpukan kegiatan yang dapat berisiko menurunkan kualitas pelaksanaan (Iqbal, 2022). Penyerapan anggaran yang berada di bawah target juga dapat mengakibatkan dana tidak dimanfaatkan secara maksimal, sehingga manfaat dari anggaran publik tidak dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.

Dalam mengevaluasi tingkat penyerapan anggaran, salah satu sumber informasi utama yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan, LRA memberikan data mengenai pencapaian pendapatan, pengeluaran, alokasi, dan pendanaan dalam jangka waktu tertentu. LRA menyajikan ilustrasi tentang perbandingan antara rencana anggaran yang telah disepakati dengan realisasinya, sehingga dapat berperan sebagai instrumen untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan anggaran. (Renaldi, 2021).

Salah satu kategori belanja dalam struktur anggaran pemerintah adalah belanja perjalanan dinas, yang dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan di luar kantor. Belanja ini memiliki peranan yang signifikan, terutama di instansi yang memiliki karakteristik kegiatan lapangan yang tinggi. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam pencapaian kinerja yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan anggaran belanja negara dan akuntabilitas pelaksanaannya (Priambodo & Yuniarianti, 2025). Besarnya proporsi belanja perjalanan dinas dalam struktur anggaran suatu instansi mencerminkan seberapa besar tuntutan mobilitas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akibatnya pengelolaan dan penyerapan anggaran perjalanan dinas menjadi hal yang penting untuk dianalisis.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara atau daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas keuangan negara dan daerah (Peraturan

Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan). Untuk menjalankan fungsi pengawasan di tingkat daerah, BPKP membentuk kantor perwakilan yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya adalah Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai lembaga pengawasan, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik kegiatan lapangan yang sangat tinggi. Tugas pengawasan, pemeriksaan, pembinaan, dan koordinasi yang menjadi inti kegiatan BPKP mengharuskan para pegawainya untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, baik di dalam kota maupun ke luar kota. Hal ini menjadikan belanja perjalanan dinas sebagai salah satu komponen belanja terbesar dalam struktur anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, tingkat penyerapan belanja perjalanan dinas menjadi salah satu cerminan dari seberapa optimal pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP dalam satu tahun anggaran.

Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran, tingkat penyerapan belanja perjalanan dinas di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menunjukkan angka yang cukup signifikan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024-2025

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2024	4.987.385.000	4.908.108.901	98,41%
2025	6.477.484.000	6.470.129.544	99,89%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Perwakilan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan data tersebut, tingkat penyerapan belanja perjalanan dinas di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, tingkat penyerapan mencapai 98,41%, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 99,89%. Tingkat penyerapan yang tinggi ini menunjukkan bahwa sebagian besar dana telah digunakan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat sisa anggaran yang tidak dapat terserap sepenuhnya hingga akhir tahun anggaran, yang menunjukkan bahwa meskipun capaian penyerapan sudah sangat baik, masih terdapat faktor-faktor tertentu yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Subkoordinator Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anggaran tidak dapat terserap sepenuhnya. Faktor-faktor tersebut meliputi perbedaan antara estimasi biaya yang direncanakan dengan realisasi yang terjadi di lapangan, adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, keterbatasan waktu dalam proses revisi anggaran, serta kendala administratif dalam pengelolaan uang muka perjalanan dinas. Selain itu, pola penyerapan anggaran juga menunjukkan

kecenderungan meningkat di akhir tahun, yang disebabkan oleh proses perencanaan yang masih berjalan di awal tahun serta pelaksanaan kegiatan yang lebih intensif menjelang penutupan tahun anggaran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tingkat penyerapan anggaran tidak hanya dipengaruhi oleh pelaksanaan program, tetapi juga oleh berbagai faktor seperti perencanaan anggaran, kebijakan pemerintah, koordinasi antar pihak, serta kendala teknis dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis tingkat penyerapan belanja perjalanan dinas di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2025 serta menelaah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tingkat penyerapan tersebut

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana tingkat penyerapan belanja perjalanan dinas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025?
- 2) Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja perjalanan dinas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui tingkat penyerapan belanja perjalanan dinas pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.
- 2) Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi elemen-elemen yang berpengaruh terhadap proporsi penggunaan anggaran perjalanan dinas di

Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025.

1.4. Metode Penulisan

Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan dukungan data kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah fenomena dalam bentuk angka serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi fenomena tersebut. Menurut Hardani et al. (2020) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki, menggambarkan, dan menjelaskan kondisi atau fenomena yang ada tanpa bertujuan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

Observasi dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat selama kegiatan magang berlangsung, yaitu pada periode 5 Januari sampai dengan 4 Maret 2026. Lokasi observasi berada di lingkungan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Objek dalam penulisan ini adalah data anggaran belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2025 yang meliputi pagu anggaran dan realisasi anggaran.

1.4.1. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Dokumentasi

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen, arsip, dan laporan yang relevan. Menurut Hardani et al. (2020), studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari catatan, arsip, laporan, maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam

penulisan ini, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berkaitan dengan belanja perjalanan dinas.

2. Studi Kepustakaan

adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik yang dibahas. Menurut Hardani et al. (2020) studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penulisan ini, studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyerapan anggaran.

3. Wawancara

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi secara langsung. Menurut Hardani et al. (2020), wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi dan percakapan langsung antara peneliti dengan narasumber guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penulisan ini, wawancara dilakukan dengan Subkoordinator Keuangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan belanja perjalanan dinas.

1.4.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Data Kuantitatif

yaitu data dalam bentuk angka yang berkaitan dengan pagu dan realisasi anggaran. Menurut Hardani et al. (2020), data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka dan dapat diukur atau dihitung secara numerik.

2. Data Kualitatif

yaitu data berupa informasi atau keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara. Menurut Hardani et al. (2020), data kualitatif merupakan data yang berupa kata-kata, kalimat, atau narasi yang menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu.

1.4.3. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Menurut Hardani et al. (2020), analisis deskriptif adalah teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan data yang telah terkumpul secara sistematis sebagaimana adanya.

Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung tingkat penyerapan anggaran berdasarkan perbandingan antara realisasi dan pagu anggaran. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan mengolah hasil wawancara untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan anggaran.

1.4.4. Langkah-Langkah Analisis Data

1. Mengumpulkan data pagu dan realisasi anggaran belanja perjalanan dinas Tahun Anggaran 2025.
2. Mengelompokkan data sesuai dengan jenis belanja perjalanan dinas.
3. Menghitung tingkat penyerapan anggaran dengan membandingkan realisasi dengan pagu anggaran.
4. Menyajikan hasil perhitungan dalam bentuk tabel dan persentase.
5. Menganalisis tingkat penyerapan anggaran yang telah diperoleh.
6. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan berdasarkan hasil wawancara.
7. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

1.5. Tempat Dan Waktu Magang

Program magang dilaksanakan di Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, yang beralamat di Jl. Bypass KM 14, Aie Pacah, Sungai Sapih, Kuranji 25177 Padang Sumatra Barat. Instansi ini merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas dan fungsi utama dalam melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional, sehingga menjadi lingkungan yang relevan untuk mempelajari praktik pengelolaan dan penyerapan anggaran belanja instansi pemerintah secara langsung.

Pelaksanaan magang berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan, terhitung sejak 5 Januari 2026 sampai dengan 4 Maret 2026, atau setara dengan 40 hari kerja sesuai ketentuan kampus.

1.6. Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang menjelaskan alasan dan pentingnya pembahasan mengenai belanja perjalanan dinas, khususnya terkait tingkat penyerapan anggaran. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, tujuan penulisan yang ingin dicapai, serta metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam pembahasan. Materi yang dibahas meliputi pengertian anggaran, laporan realisasi anggaran, belanja pemerintah, belanja operasional, belanja perjalanan dinas, serta penyerapan anggaran. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan konsep dan rumus yang digunakan dalam mengukur tingkat penyerapan anggaran.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini berisi gambaran umum mengenai Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Uraian dalam bab ini meliputi sejarah singkat instansi, tugas

dan fungsi, struktur organisasi, serta gambaran umum kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, khususnya belanja perjalanan dinas.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penyajian data serta pembahasan mengenai tingkat penyerapan belanja perjalanan dinas pada Tahun Anggaran 2025. Pada bab ini dilakukan analisis terhadap data pagu dan realisasi anggaran, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan jenis belanja. Selain itu, dibahas pula faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan anggaran berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, serta saran yang diberikan sebagai bahan perbaikan dalam pengelolaan belanja perjalanan dinas pada periode selanjutnya.

